

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Peristiwa 11 November 1975 merupakan salah satu kejadian bersejarah yang sampai sekarang masih membekas pada ingatan semua penduduk Australia. Pada saat itu PM Australia, Gough Whitlam dijatuhkan oleh Gubernur Jenderal Kerr, dimana kasus ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Australia.

Dari kasus ini ada dua hal yang bisa dilihat dengan jelas:

Pertama; posisi Gubernur Jenderal di Australia yang mewakili Ratu Inggris sebagai kepala negara Australia adalah sisa produk kolonialisme Inggris sehingga pemecatan PM Whitlam yang terpilih dalam suatu pemilu yang demokratis oleh sebagian besar rakyat Australia.

Kedua; Konstitusi Australia yang lahir dari konstitusi Inggris memerlukan banyak perbaikan, karena terdapat pasal-pasal yang sangat kuno yang sudah tidak relevan dengan perkembangan Australia, sehingga tidak jarang secara tidak tertulis terbentuklah aturan main politik Australia (konvensi).

Bila dilihat secara hukum konstitusional, tindakan Kerr tidak menyalahi aturan apapun karena ia mempunyai Reserve Power (kekuasaan luar biasa) untuk menjatuhkan pejabat pemerintah Australia yang dianggap tidak sanggup memerintah. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa reserve power ini tidak ada aturan hukumnya dan tergantung dari kebijaksanaan Gubernur Jenderal. Reserve power sebagai salah satu

menurut teorinya bahwa konstitusi juga menyatakan bahwa kekuasaan itu hanya akan dipergunakan bila ada kesepakatan dengan PM Australia dan pimpinan partai oposisi. Penggunaan Reserve power juga menunjukkan bahwa Australia masih mengakui kekuasaan serta keputusan Ratu Inggris secara mutlak melalui wakilnya Gubernur Jenderal berani menjatuhkan Perdana menteri terpilih padahal pengangkatan seorang Gubernur Jenderal berdasarkan atas rekomendasi dari seorang Perdana Menteri.

### **B. Latar belakang masalah**

Australia adalah negara penganut demokrasi liberal system Westminster. Dasar dari mekanisme politik yang berlaku di Australia merupakan gabungan dari model pemerintahan parlementer yang diwarisi dari Inggris dan system pemerintahan federal yang diadopsi dari Amerika Serikat. Dalam penerapannya dua system tersebut telah mengalami modifikasi. Yang menjadi dasar penggabungan dan modifikasi kedua model tersebut disebabkan karakter dan kondisi masyarakat Australia serta penyesuaian terhadap system politik yang berlaku sebelumnya di masing-masing koloni.

Dalam system ini, system pemerintahan Inggris yang menjadi acuan utama walaupun antara Inggris dan Australia sebenarnya ada perbedaan yang cukup menonjol.<sup>1</sup> Perbedaan antara system politik Inggris dan Australia terletak pada konstitusi atau perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Djaensch ; An Introduction to Australian Politics, Second edition Longman Chesire Pty. Ltd melborne Australia, 1984, hal 216-217.

Dalam konstitusi persemakmuran, kedudukan Ratu Inggris adalah sebagai kepala negara. Ratu Inggris sebagai sumber otoritas legal terhadap seluruh aktivitas pemerintahan dan menguasai posisi-posisi strategis. Yaitu lembaga yang bertugas merancang dan mengesahkan segala perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemerintahan, jabatan kepala eksekutif secara teoritis berada di tangan Ratu. Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Gubernur Jenderal juga mengesahkan suatu proses pembentukan undang-undang terutama dalam bidang yuridiksi. Pengesahan dari Gubernur Jenderal merupakan prasyarat legal agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan. Disamping itu Gubernur Jenderal juga bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Australia, bahkan secara teoritis Gubernur Jenderal bertindak sebagai kepala pemerintahan yang juga memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri serta membubarkan parlemen dan pemerintahan.

Keberadaan Gubernur Jenderal yang mewakili Ratu Inggris dalam system politik Australia sebenarnya sudah diakui oleh seluruh rakyat Australia, sejak Australia diproklamasikan sebagai negara persemakmuran pada tanggal 1 januari 1901. Pada waktu itu negara federasi Australia memilih Lord Hopetown sebagai Gubernur Jenderal Dan Edmund Barton sebagai Perdana Menteri pertama.<sup>2</sup>

Mengenai kedudukan Perdana Menteri bahwa perdana menteri punya kekuasaan menetapkan acara dan mengawali tugas-tugas kabinet. Dalam konstitusi Australia tidak terdapat satu pasal pun yang menguraikan secara tegas berkaitan dengan wewenang dan kewajiban-kewajibannya. Perdana Menteri juga mempunyai kewenangan untuk

---

<sup>2</sup>. Republika, edisi 13 mei 1993

memberikan rekomendasi bagi calon gubernur Jenderal yang akan mewakili Ratu Inggris sebagai kepala negara Australia.

Sebenarnya Australia sudah cukup lama menyatakan dirinya sebagai negara merdeka dan mandiri hal itu terlihat dengan kemampuannya menyelesaikan krisis-krisis politik Australia. Kenyataannya, meskipun Australia sebagai negara merdeka tetapi merupakan anggota negara persemakmuran Inggris, sehingga Ratu Elizabeth II sebagai kepala pemerintahan Inggris, sekaligus sebagai Ratu Australia. Pengaruh lain dari system politik Inggris bahwa lembaga-lembaga dan tradisi yang diwariskan dari Inggris menjadikan Australia memiliki konstitusi yang tidak tertulis (konversi). Konversi ini walaupun tidak merupakan bagian dari konstitusi namun diterima oleh para politisi pada umumnya dan dianggap lebih "sah" dan penting dalam menguraikan secara detail setiap aktivitas politik dibandingkan dengan keberadaan konstitusi itu sendiri.<sup>3</sup> Hal lain yang diatur dalam konstitusi Australia bahwa Gubernur jenderal juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan punya kekuatan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sesuai dengan kehendaknya<sup>4</sup>.

Dengan penjelasan diatas ada fakta yang dapat diamati yaitu adanya suatu kesalahan-kesalahan Whitlam antara lain terjadinya pengangguran yang cukup tinggi kemudian tingkat inflasi yang mengkhawatirkan. Keadaan ini semakin memperkuat alasan pihak luar untuk mencoba mengganggu pemerintahan Whitlam.

---

<sup>3</sup> D. Jaensch, *op cit.* Hal 36

Ikatan yang terjadi antara Australia dan Inggris memang membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bernegara di Australia<sup>5</sup>. Sementara disisi lain ikatan dengan Amerika Serikat juga membawa dampak yang cukup besar terutama mengenai percampuran lembaga-lembaga dan tradisi Inggris dengan struktur federal sehingga menjadikan Australia memiliki dua pengaturan konstitusional, yaitu UU dan konvensional, sehingga ada kecenderungan tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem politik dinegara tersebut.

Rumitnya system politik yang diterapkan Australia akibat dianutnya dua system pengaturan konstitusional mencapai puncaknya pada tanggal 11 November 1975 dimana Gough Whitlam sebagai wakil terpilih dalam suatu pemilu yang demokratis dipecat oleh Gubernur Jenderal Australia John Kerr yang merupakan wakil dari Ratu Inggris, padahal pengangkatan Gubernur Jenderal harus mendapatkan rekomendasi dari perdana menteri. Hal itu disebabkan oleh ketidakberhasilan pemerintahan Whitlam dalam kebijakan dan program pemerintahannya. Selain itu alasan Inggris untuk menjatuhkan yaitu melihat dari ketidak berhasilan Whitlam dalam memimpin otomatis mengakibatkan image Inggris juga jelek dimata dunia karena Australia adalah salah satu negara persemakmuran Inggris. Itulah masalah penjatuhan Gough Whitlam secara global .

---

<sup>5</sup> . Hilman Adil, Australia policy toward Indonesia During Confrontation 1962-1966 Institute of South East Asian Studies, Singapore, 1977

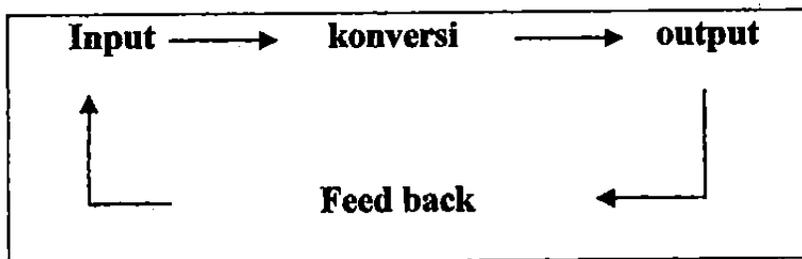
### C. Perumusan Masalah

Mengapa Gubernur Jenderal Sir John Ker Menjatuhkan Perdana Menteri Gough

Whitlam

### D. Kerangka Teori

Apa yang terjadi dalam system politik Australia sebenarnya tergantung dari pelaku politik itu sendiri dalam artian orang-orang yang terlibat didalamnya yang menjadi tokoh pemerintahan seperti Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri sangat menentukan keberhasilan dari system politik yang dijalankan di negara tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori system politik menurut David Easton. Teori ini mencoba membantu cara memandang, menilai dan menafsirkan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya berdasarkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat atau negara tersebut. Selain itu bagaimana cara ia memandang dan menilai kedudukannya sendiri dalam lingkungan tersebut<sup>6</sup>.



<sup>6</sup>. Dikutip oleh Holsti, Foreign Policy Formation Viewed Cognitively, dalam Robert Axelrod (ed)

Persepsi mengandung unsure-unsur yang disebut sebagai nilai-nilai (values), keyakinan dasar (belief), dan data-data serta informasi yang diterima melalui proses kognitif (cognition) yang serta keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung dan memungkinkan seseorang mampu memahami dan memperlakukan lingkungan dan masalah yang dihadapi dengan cara tertentu.

Teori ini sendiri pada prinsipnya memusatkan perhatian pada masalah yang timbul, bagaimana tingkah laku (behaviour) pembuat keputusan untuk dapat memahami bagaimana suatu keputusan, tindakan atau tujuan yang dihasilkan. Makin tinggi kedudukan aktor dalam hirarki pembuatan kebijaksanaan, maka makin penting pula bagi kita untuk dapat mengetahui cirri-ciri kepribadiannya, mengenai persepsinya, mengenai kenyataannya yang dihadapi, latar belakang sejarah hidupnya, pendidikannya, keyakinan dasarnya dan nilai-nilai yang dianutnya.

Dari sisi ini bisa dilihat bahwa tindakan yang diambil Gubernur Jenderal Kerr berdasarkan cara pandangya terhadap situasi yang terjadi di Australia pada tahun 1975 terutama tentang masalah kegagalan dalam bidang ekonomi dimana terjadi inflasi dan pengangguran sedangkan dalam bidang politik masalah Loans affairs (skandal pinjaman luar negeri), perpecahan antara PM, kabinet dan kaukus serta kesalahan dalam manajemen media massa pada saat Whitlam berkuasa. Gubernur Jenderal Kerr yakin bahwa dia harus mengambil tindakan tersebut berdasarkan posisinya sebagai Gubernur Jenderal yang juga berperan dalam system politik di Australia. Selain itu Kerr juga merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan pemerintahan di Australia

mempunyai tujuan bahwa kondisi politik Australia yang sudah terlihat kacau dengan gagalnya Whitlam menjalin kerjasama yang harmonis dengan ACTU (Australian Council of Trade Union) yang bersumber pada hubungan yang tidak harmonis antara PM Whitlam, kabinet dan kaukus (semua anggota partai buruh yang berada didalam parlemen tingkat federal ataupun negara bagian), sehingga apa yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan yang menyelamatkan negaranya. Disisi lain, Whitlam yang dijatuhkan hanya bisa menerima karena memang keadaan yang terjadi pada saat itu memojokkan posisinya sebagai Perdana Menteri.

Kegagalan Whitlam dalam pemerintahan memang tidak bisa dipertahankan dan kedudukan Whitlam sebagai Perdana Menteri yang tidak mau mengundurkan diri menganggap bahwa masa jabatannya belum berakhir (untuk masa tiga tahun sejak terpilih menjadi Perdana Menteri) dan hal-hal yang mengenai pemilihan sebenarnya dikuasakan kepada perdana menteri sehingga dia berpikir baru akan mengundurkan diri dan menyelenggarakan pemilu apabila menguntungkan pihaknya sehingga sambil menunggu waktu yang ditentukan (masa jabatannya berakhir) dia bisa memperbaiki kondisi dan keadaan diAustralia menjadi lebih baik.

Terlihat disini dua pemikiran yang berbeda dari pemimpin negara tersebut dimana Gubernur jenderal Kerr menganggap bahwa keadaan yang terjadi sudah seharusnya diakhiri dengan menjatuhkan Whitlam yang menjadi perdana menteri pada saat itu karena dianggap tidak beres dalam melakukan tugasnya. Tetapi bila dilihat dari sisi Whitlam sendiri bahwa apa yang dilakukan Kerr dianggap terlalu berani mengingat masa jabatannya belum berakhir dan dianggap tidak memberikan kesempatan terhadap

pemerintahan Whitlam, apalagi hal-hal yang mengenai pemilihan umum dikuasakan kepada Perdana Menteri<sup>7</sup>.

Pemecatan tersebut mempolarisasikan masyarakat Australia yang melihat penjatuhan kepemimpinan Gough Whitlam tersebut sebagai hitam diatas putih. Penduduk asli Australia yang menyalahkan Gubernur Jenderal biasanya adalah pendukung partai buruh, yang sampai tahun 1972 telah menjadi partai oposisi selama 23 tahun. Sebaliknya mereka mendukung tindakan Gubernur Jenderal ini biasanya adalah pendukung partai liberal.

Kemudian peneliti akan mencoba menjelaskan kasus ini dengan teori yang kedua yaitu Neorealis yang dikemukakan oleh kenneth waltz yaitu Dalam memahami suatu fenomena internasional, para penstudi harus memilih darimana ia akan memandang. Menurut Thomas Kuhn, hal ini disebut "paradigma" yaitu proses konsolidasi dan integrasi. Dimana di dalam paradigma sebagai pemikiran yang memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, kerangka konseptual, metodologis dan tehnik analisa<sup>8</sup>. Dalam menggambarkan fenomena internasional, penulis menggunakan pendekatan Neorealis terutama yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz<sup>9</sup> dalam bukunya *Theory of International Politics* dimana ia merubah realis "thought" kedalam teori formal menjadi lebih sistematis dan teliti. Dalam pandangan neorealis yang merupakan perluasan dari Realis tentang politik internasional. bahwa neorealis

<sup>7</sup> D. Solomon, *Inside The Australia Parliament* (Sydney ; George Allen & Unwin) 1978. Hal 166-168

<sup>8</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 8

<sup>9</sup> Kenneth Waltz adalah Profesor Ilmu Politik pada Universitas Berkeley tahun 1971, mendapat gelar doktor dengan disertasi "Man, the State and War". Buku "Theory of International Politics" merupakan buku pembelaannya terhadap pemikiran Neorealisme. Lihat dalam Martin Griffiths, *Lima puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 64

berpendapat, penjelasan pada sistem global cukup untuk memperhitungkan kecenderungan utama dalam dunia politik. Seperti pendapat Waltz :

*Expressed his neorealist conceptualization of determinants of international behavior, international structure emerges from the interaction of states and constrains them from taking certain actions while propelling them toward others*<sup>10</sup>.

(mengungkapkan konsep neorealisnya bahwa faktor utama adalah tingkah laku internasional."Struktur internasional dari interaksi negara-negara dan akan memaksa mereka untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk melakukan tekanan satu terhadap yang lain.")

Waltz mendefinisikan dalam pemikiran Neorealis, Struktur Politik Internasional dengan *dua kriteria*<sup>11</sup>. *Pertama*, prinsip pengaturan yang dengannya negara berhubungan satu dengan yang lain. Sistem antar negara adalah sistem anarki atau tidak adanya institusi pusat diatas negara dan merupakan sifat abadi dari struktur sistem. Negara tetap merupakan aktor utama yang akan beraksi menurut prinsip-prinsip perlindungan diri dan pencarian untuk menjamin pertahanan diri. *Kedua*, struktur, Distribusi kemampuan yang berbeda-beda pada setiap negara disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara. rujukan empiris dari variabel ini adalah jumlah negara adidaya yang mendominasi sistem, yang menurut Waltz tidak lebih dari delapan negara yang utama dalam bisa dianggap mendominasi sistem, maka Politik Internasional dapat dipelajari menurut logika sejumlah kecil sistem.<sup>12</sup>

Menurut Waltz, "konsep struktur didasarkan pada kenyataan unit-unit yang secara berbeda ditumpangkan dan dikombinasikan berperilaku secara berbeda dan dalam

<sup>10</sup> lihat artikel Charles W. Kegley Jr. dan Uegene R. Wittkopf, "Understanding World Politics: The Elusive Quest For Theory", dalam James R. Headley, ed., *World Politics: Trends and Transformation*, Seventh Edition, Macmillan Press Ltd., London, 1999, hal. 32

<sup>11</sup> Martin Griffiths, *Op.Cit*, hal. 65-66

<sup>12</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, Reading, Adison-Wesley, Massachusetts, 1997, hal 131

interaksi membuahkan hasil-hasil yang berbeda".<sup>13</sup>

*Capabilities define the position of states in the system, and the distribution of capabilities defines the structure of the system and shapes the ways the units interact with one another*<sup>14</sup>.

(kemampuan akan menegaskan posisi negara dalam sistem dan distribusi dari kemampuan akan menentukan struktur sistem dan menentukan cara-cara berinteraksi satu dengan yang lain.)

Pola-pola interaksi dalam hal keamanan terdapat banyak variasi, tergantung kapabilitas masing-masing. Hal itu akan menunjukkan karakteristik penting yang membedakan satu negara dengan yang lain. Sistem Internasional berulang kali dibentuk oleh perubahan-perubahan dalam distribusi kapabilitas diantara unit-unitnya. Kekuatan-kekuatan ditingkat unitlah yang diyakini membentuk kemungkinan-kemungkinan bagi perubahan sistemik<sup>15</sup>.

*Power* (kekuatan) juga merupakan konsep utama dalam neorealis, negara akan selalu mengejar kekuasaan untuk pertahanan diri, meskipun power tidak lagi menjadi tujuan utama. Menurut Kindermann, "sebagaimana instrumen power dan sanksi tidak menghapus hakekat hukum, hakekat ilmu politik tidak terhapus hanya dengan menganggap power sebagai alatnya yang paling penting"<sup>16</sup>. seperti yang dijelaskan oleh

Waltz :

*"explain, the" means fall into two categories: internal efforts (moves to increase economic capability, to increase military strength, to develop clever strategies) and external efforts (moves to strengthen and enlarge one's own alliance or to weaken and shrink an opposing one)*<sup>17</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 81

<sup>14</sup> James R. Headley, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Kenneth Waltz, *Op.Cit.*, hal. 60-67

<sup>16</sup> James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., diterjemahkan oleh M. Amien Rais, Harwanto D, Tulus Warsito. "Teori Teori Hubungan Internasional" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1995, hal. 259

(menjelaskan, kekuatan dimasukkan dalam dua kategori: upaya internal [tindakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, untuk meningkatkan kerkuatan militer, dan pembangunan strategi yang jitu] dan upaya eksternal [tindakan untuk memperkuat dan memperbesar aliansi atau memperlemah dan menyusutkan kekuatan oposisi])

Hal ini dapat disimpulkan bahwa negara-negara akan berupaya untuk bertahan hidup atau meningkatkan keamanan. Dalam sistem seperti itu, didasarkan pada prinsip menolong diri sendiri. Negara-negara akan terlibat dalam usaha internal untuk meningkatkan kapabilitas politik, militer, dan ekonomi, negara mengembangkan mengembangkan strategi yang efektif. Negara juga mengupayakan usaha eksternal untuk beraliansi dengan aktor lain. Struktur sistem, terutama jumlah aktor dan kapabilitas masing-masing negara akan membentuk pola-pola interaksi.

Otonomi dan komponen Struktural Sistem Internasional, mempengaruhi perilaku negara dan karenanya mengakibatkan munculnya, misalnya, insiden perang, dengan mencegah negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu dan dengan mengarahkan kecenderungan yang ada pada setiap negara ke arah lainnya. selanjutnya Waltz berpendapat, negara sebagai aktor yang utuh, pada tingkat minimum mencari keselamatannya sendiri dan pada tingkat maksimum berusaha mencari dominasi universal.

*furthermore, because the instinct for survival drives states, neorealism assert that balance of power form automatically, regardless of whether "some or all states consciously aim to establish and maintain a balance, or whether "some or all states aim for universal domination" <sup>18</sup>*

(selanjutnya, karena negara di gerakkan oleh naluri untuk pertahanan diri. Neorealis menegaskan perimbangan kekuatan menjadi bentuk otomatis, tanpa memperhatikan apakah "beberapa negara atau semua negara secara sadar bertujuan untuk meningkatkan perimbangan atau "apakah beberapa negara atau semua negara bertujuan untuk dominasi global")

Neorealisme menjadikan sistem internasional sebagai fokus analisa, dengan kata

lain *Struktur Sistem* yang membentuk hubungan politik diantara para anggotanya. Pendekatan neorealis didasarkan pada hubungan yang berpola diantara para aktor di dalam sebuah sistem yang anarkis. Struktur mengkonotasikan cara dimana bagian-bagian tersusun. Di dalam politik domestik terdapat sebuah hubungan yang hierarkis, di dalam hubungan itu unit-unit berada dalam perbedaan formal satu dengan yang lain sesuai dengan tingkat otoritas mereka atau fungsi yang mereka jalankan. Sebaliknya sistem internasional tidak mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan yang sebanding. Para aktor berada dalam sebuah hubungan horisontal, dengan tiap negara berdaulat satu sama lain.

Waltz selanjutnya mendefinisikan struktur dengan spesifikasi fungsi dari unit-unitnya. Semakin hierarkis sistem itu, semakin besar perbedaan fungsi-fungsinya; semakin anarkis, semakin besar kesamaan dalam fungsi diantara unit-unitnya.<sup>19</sup>

Neorealisme telah merangkul karya yang disebut Realisme Struktural, pendekatan Neorealisme mewakili sebuah upaya yang tidak hanya mengambil unsur-unsur sebuah teori dalam Realisme klasik. Dan apabila dihubungkan dengan kasus penelitian ini sangatlah jelas yaitu penjelasan teori realis yang sangat tegas menjelaskan dimana Inggris dan Amerika sangat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Australia baik itu dari segi ekonomi, politik, dan militer. Dari segi ekonomi adanya keadaan inflasi negara Australia pada tahun 1972-1975 membuat negara Inggris harus turun tangan atau memiliki andil yang sangat besar kemudian masalah peminjaman luar negeri yaitu Inggris memberikan pinjaman uang dengan bunga yang rendah yang menjadikan negara

Austrasia memiliki ketergantungan terhadap negara Inggris. Dari segi Politik adanya

---

<sup>19</sup> Kenneth Waltz, *Op.Cit*, hal. 93-101

pengaruh pembuatan kebijakan dalam parlemen dimana ada perwakilan-perwakilan anggota parlemen yang berasal dari partai-partai yang merupakan partai yang bisa dikatakan sebagai tangan kanan negara Inggris, dilihat dari contoh kecil ini kita bisa melihat bahwa adanya usaha-usaha negara asing untuk mencoba memasukkan kepentingannya ke dalam negara Australia. Kemudian yang ketiga dilihat dari segi militer dengan adanya kekuatan militer yang lebih kuat, negara Inggris dan Amerika mencoba memberikan jaminan keamanan kepada Australia dengan timbal balik yang menguntungkan negara-negara tersebut baik dari segi ekonomi maupun politik.

### **E. Hipotesa**

Dualisme kepemimpinan dalam pelaksanaan demokratisasi di Australia (studi kasus pemecatan PM Gough Whitlam):

Faktor-faktor yang menyebabkan Perdana Menteri Whitlam dijatuhkan pada masa jabatannya antara lain:

- a. Kegagalan Whitlam dalam perencanaan ekonomi. Yaitu masalah inflasi namun karena Whitlam tidak terlalu fokus terhadap masalah inflasi tetapi menganggap bahwa pengangguran merupakan masalah yang harus lebih diutamakan daripada mengusahakan tingkat penurunan inflasi yang sejak tahun 1951 merupakan tingkat tertinggi yaitu sebesar 7 %. Merupakan satu kelemahan dari Whitlam yang dianggap pemerintah Australia dan Inggris pada waktu itu karena masalah inflasi selalu diabaikan oleh

b. Kegagalan dalam bidang politik antara lain :

1. loans affair yaitu merupakan sebuah skandal pinjaman luar negeri. Disebut skandal karena tanpa sepengetahuan parlemen dan mayoritas anggota kabinet, pemerintah memberikan kekuasaan kepada menteri pertambangan dan energi, Rex Connor untuk menghipun pinjaman sebesar 4 milyar dollar AS.
2. Pemerintah dan Serikat buruh yaitu interaksi yang baik antara pemerintah whitlam dengan serikat buruh yang tergabung dalam Australian Council of Trade Union (ACTU ) tetapi gagal dilakukan oleh pemerintah whitlam. Dari sini pemerintah whitlam kehilangan kesempatan kerjasama yang seharusnya bisa dijalin terhadap ACTU. Sebenarnya ACTU bisa menjadi mitra pemerintah whitlam dalam menciptakan ekonomi yang lebih baik.
3. Perpecahan antara PM, Kabinet dan kaukus dan factor-faktor yang menyebabkan perpecahan diantara ketiganya ini diawali dengan pengalaman yang minim dari pemerintahan whitlam sendiri. Karena sejak awal terpilihnya whitlam sebagai perdana menteri, pemerintahan whitlam tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk memimpin suatu departemen yang berskala nasional mengingat kondisi partai biruh yang dulu hanya dianggap sebagai partai oposisi selama 23 tahun.

c. Kebijakan Whitlam dalam memajukan media massa yaitu sebagai negara demokrasi dimana konsep pemerintahnya didasarkan atas pemerintahan rakyat, maka dalam upaya untuk menciptakan sistem demokrasi yang representatif. Australia berupaya menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Di sini para politisi Australia menyesuaikan tindakan kebijaksanaan dan program-program mereka dengan pada pemerintahan rakyat, maka pada tingkat lokal akan menilai pemerintahan dari pemerintah. Di sini jelas sekali terlihat bahwa jika pemerintahannya akan pemerintahan di tingkat ekonomi yang diperbar. Di sini media massa punya peran yang cukup besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan perubahan umum.

d. Mencoba menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan media pemerintah tersebut dengan Perdana Menteri dalam konstitusi Australia. Dengan melihat adanya dua sumber hukum Australia yang diambil dari negara AS dan Inggris.

2. Metodologi Penelitian

Kajian ini dilakukan melalui Library Research Data-data yang diperoleh

## **G. Jangkauan Penelitian**

Skripsi ini menitikberatkan perhatiannya pada periode kepemimpinan Whitlam antara tahun 1972-1975 dengan penekanan analisa pada kasus penjatuhan perdana menteri oleh gubernur jenderal yang terjadi pada tanggal 11 November 1975 yang merupakan substansi inti dari obyek penelitian.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika dari penulisan skripsi ini antara lain mencakup:

**BAB I** memuat pendahuluan dari tulisan yang didalamnya mencakup alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, serta jangkauan penelitian dari skripsi yang akan ditulis.

**BAB II** memuat tentang bentuk negara dan system pemerintahan yang ada dalam system pemerintahan Australia merupakan gambaran umum yang akan ditulis dalam skripsi ini.

Secara garis besar memuat tentang kekuasaan parlemen, kekuasaan federal, kekuasaan gubernur jenderal dan kekuasaan perdana menteri dalam sistem pemerintahan Australia.

Seta hubungan antar Inggris dengan partai buruh dan partai liberal.

**BAB III** Memaparkan tentang proses pemecatan Perdana Menteri oleh Gubernur Jenderal

**BAB IV** memuat tentang sejauh mana keterlibatan Inggris dalam penjatuhan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam

**BAB V** merupakan bagian penutup dari skripsi ini dan merupakan kesimpulan dari permasalahan yang terjadi dari permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan

demokratisasi di Australia